

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, E. D. P., Rahayu, S., & Wahyudi, I. (2011). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi)*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, 13(1), 69-82.
- Bangun, N. I. B. (2019). *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Karo*.
- Djaenuri, H. A., & Enceng, M. S. (2012). *Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran*. Penerbit Salemba.
- Hanafi, D. (2009). *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. UB Press.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Kencana.
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- MEGARANI, D., Burhanuddin, B., & Aryanto, A. (2018). *Kinerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Purwiyanti, D. (2017). *Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)*. Katalogis, 5(3).
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- Rochjadi, A. (2006). *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Subekan, A & Hartoyono, N. (2012). *Keuangan Daerah: Terapi Atas Kemiskinan*. Malang: Alta Pustaka.

Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan*.